AKIBAT HUKUM KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DI DANA PENSIUN BUMN

Oleh :

Arif Hartanto¹

Universitas Jakarta

Email: ahartanto@yahoo.com

ABSTRACT

The economy is a vital and strategic field in the implementation of the life of the nation and state, even economic development has always been an important agenda and the main focus in every policy formulation of the ruling government. BUMN as a national economic actor that has a dual role, namely as an agent of development as well as a business entity, is a concrete form of extension of the state's hand in realizing the ideals of the nation and state, namely advancing general welfare. Like a company, BUMN Persero as a form of BUMN will definitely experience profits and losses due to the dynamics of the business world. It becomes a problem when the losses experienced by BUMN Persero are faced with various laws and regulations that apply to BUMN, both in the realm of public law and in the realm of private law. This study aims to examine whether the losses experienced by SOEs can be classified as state financial losses in the perspective of the business judgment rule doctrine. Through research conducted using the statute approach and conceptual approach, it was found that there is a dualism in the view of the position of state assets which is separated in the scope of state finances, giving rise to different interpretations of the meaning of state financial losses by law enforcement officials. This dualism of view has an impact on disharmony in the form of accountability that is requested of the Directors of BUMN Persero when there is a loss to the BUMN body because it is based on the provisions of Article 2 and/or Article 3 of Law Number 20 of 2001 in conjunction with Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption. , Directors of BUMN Persero can be held criminally responsible for alleged criminal acts of corruption because they cause state financial losses, but based on Article 97 paragraph (5) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies there is an exception so that the Directors of BUMN are not held personally responsible. Furthermore, losses to SOEs can not only occur as a result of abuse of authority but also as a result of business risks.

Keywords: *legal consequences, state-owned enterprises, state financial losses.*

A. PENDAHULUAN

Keuangan negara sekarang ini tidak dapat dipandang sebagai peran negara hanya sebagai otoritas, yang peranan / tindakannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sekarang ini negara dapat diposisikan sebagai subyek

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Jakarta

hukum privat. Walaupun demikian permasalahan terkait dengan harta kekayaan negara yang telah ditanamkan dalam persero melalui penyertaan modal memunculkan berbagai masalah, antara lain terkait dengan status Keuangan Negara yang dipisahkan. Masalah utama terkait dengan adanya perbedaan aspek hukum, yaitu aspek hukum publik dan aspek hukum privat yang mana negara sebagai subyek hukumnya. “Negara dan daerah sebagai badan hukum publik sering disebut sebagai badan hukum sui generis, artinya negara atau daerah sebagai badan hukum publik, tetapi pada saat yang sama sekaligus dapat berperan sebagai badan hukum privat.”²

Perekonomian merupakan suatu bidang vital dan strategis dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara bahkan pembangunan ekonomi selalu menjadi agenda penting serta fokus utama dalam setiap perumusan kebijakan pemerintah yang berkuasa. Tujuan berbangsa dan bernegara Indonesia pun sebagaimana yang termaktub dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tak luput mencantumkan kesejahteraan umum sebagai tonggak pembangunan bangsa Indonesia sebab pada dasarnya maju tidaknya perekonomian suatu negara menentukan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara hukum, Indonesia tidak pernah lepas untuk mendasarkan penyelenggaraan pemerintahan pada konstitusi sebagai hukum dasar. Melalui Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sejatinya telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk turut serta dalam urusan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Hal tersebut merupakan konsekuensi dianutnya konsep Negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagai konsep negara yang menghendaki agar negara turut mencampuri kepentingan warga negaranya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Esping “Negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warga negaranya.” Dengan demikian, Indonesia bukanlah sebuah negara yang hanya mengatur serta memberikan jaminan terhadap keamanan warga negaranya atau sebagai negara penjaga malam

² Fuady, Munir, *Doktrin-Doktrin dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Cet. III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm, 87

(*nachtwachterstaat*), tetapi lebih daripada itu yakni turut bertanggung jawab pula atas kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Bentuk keterlibatan negara Indonesia untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara diejawantahkan dengan adanya pendirian suatu Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disingkat BUMN, yang dalam perjalanannya turut menghasilkan barang dan/atau jasa bagi masyarakat. Dalam Penjelasan Umum angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disebut Undang-Undang BUMN, mengeksplanasikan bahwa BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta atau koperasi. Pasal 1 angka 1 Undang- Undang BUMN mendefinisikan BUMN sebagai suatu badan usaha yang penyertaan modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Didirikannya BUMN pada hakekatnya merupakan bentuk konkret negara menjalankan kewenangan yang dimilikinya yakni menguasai cabang-cabang produksi penting yang berkenaan dengan hajat hidup orang banyak.³

Dengan kata lain, BUMN merupakan perpanjangan tangan negara dalam melayani kepentingan publik melalui pengelolaan cabang-cabang strategis yang tidak dapat dikelola oleh badan usaha lainnya sekaligus untuk mencapai tujuan bangsa. Berkenaan dengan status BUMN, Indroharto dalam Ridwan HR yang dikutip oleh Henny Juliani menyatakan bahwa, “BUMN/BUMD dimasukkan sebagai instansi Pemerintah”. Demikian pula dengan kedudukan Direksi BUMN sebagai pengurus berdasarkan penjelasan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah sebagai pejabat negara sebab memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Modal dari BUMN itu sendiri merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, selanjutnya disebut Undang-Undang Keuangan Negara, termasuk dalam salah satu ruang lingkup

³ Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm, 90

keuangan negara. Berdasarkan klasifikasi tersebut dapat diketahui bahwa BUMN diatur dengan hukum publik yang pada akhirnya memberikan kewenangan pada Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK, melalui Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disebut Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BUMN. Di samping itu dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN yang berbentuk Persero harus tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebagaimana yang diamanatkan melalui Pasal 11 Undang-Undang BUMN.

Dengan berlakunya pula Undang-Undang Perseroan Terbatas menimbulkan konflik norma sebab dengan adanya pengakuan kekayaan negara yang dipisahkan termasuk dalam salah satu ruang lingkup keuangan negara menjadikan setiap kerugian yang terjadi di BUMN diklasifikasikan sebagai kerugian keuangan negara sehingga direksi dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya disebut Undang-Undang Tipikor, yang menentukan bahwa :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Layaknya suatu perusahaan pada umumnya, BUMN sebagai perpanjangan tangan dari negara yang menguasai cabang-cabang produksi penting yang berkenaan dengan hajat hidup orang banyak serta menguasai sumber daya alam Indonesia dalam operasionalnya tidak selalu berjalan dengan mulus. BUMN selalu dituntut untuk terus berinovasi dan mampu bersaing agar hakekat didirikannya suatu BUMN dapat terealisasi. Dalam operasional suatu BUMN, keputusan yang dibuat oleh direksi

sematamata merupakan suatu kewajiban bagi direksi untuk dapat mengembangkan bisnis BUMN namun suatu realita yang tidak dapat dihindari adalah suatu badan usaha pasti akan mengalami keuntungan maupun kerugian.

Dengan kerangka berpikir demikian maka kerugian yang dialami oleh BUMN tidak hanya disebabkan karena adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh direksi namun juga sangat dimungkinkan terjadi akibat dari adanya risiko bisnis. Sejatinya dalam hukum perusahaan, terdapat doktrin yang telah dikenal secara luas yakni doktrin business judgment rule. Pandangan Boen mengungkapkan bahwa “Doktrin business judgment rule merupakan suatu doktrin yang mengajarkan bahwa suatu putusan direksi mengenai aktivitas perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, meskipun putusan tersebut kemudian ternyata salah atau merugikan perseroan.” Pada dasarnya melalui ketentuan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan ruang pengecualian bagi direksi untuk dimintakan pertanggungjawaban penuh secara pribadi. Pada akhirnya, dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur BUMN menimbulkan ketidakharmonisan bentuk pertanggungjawaban yang dimintakan kepada direksi manakala terjadi kerugian pada BUMN.

B. RUMUSAN MASALAH

Uraian diatas tersebut melahirkan permasalahan dalam penulisan artikel ini sehingga dapat ditarik permasalahan diantaranya:

- 1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang mengakibatkan kerugian Negara pada BUMN?
- 2) Apakah fungsi penegakan hukum pada Perusahaan BUMN belum maksimal?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari ketentuan rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian dinyatakan dalam hal:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban yang mengakibatkan kerugian Negara pada BUMN.
- 2) Untuk mengkaji dan mengungkapkan fungsi penegakan hukum pada Perusahaan BUMN belum maksimal.

D. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) secara deskriptif kualitatif. Mengingat jenis penelitian ini berpangkal pada penelitian normatif, maka sebagian besar data dan bahan-bahan hukum yang digunakan mengacu pada data sekunder yang mencakup bahan-bahan hukum primer, terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan konvensi-konvensi yang terkait dengan pengungkapan rahasia bank untuk kepentingan peradilan dalam tindak pidana perbankan, serta bahan hukum sekunder dan tersier.⁴

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder dengan mengulik pada isu permasalahan kompleksitas perbankan secara internet pengungkapan rahasia bank antara kepentingan negara dan perlindungan kepada nasabah.⁵ Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan penelusuran pustaka (*library research*), baik secara ekstensif maupun intensif. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data sekunder, berupa bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum bersifat normatif-prespektif, digunakan terutama untuk mengkaji permasalahan hukum yang terkait dengan substansi peraturan hukum positifnya (*ius constitutum*) yang sifatnya mengatur tentang problematika pengungkapan rahasia bank antara kepentingan negara dan perlindungan kepada nasabah, berdasarkan kekuatan mengikatnya diklasifikasikan sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁶ Teknik analisis data yang digunakan merupakan analisis yuridis yaitu analisis yang mendasarkan pada , konseptual, teori-teori dan peraturan perundang-undangan (*statute*).⁷

⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017, hlm, 90

⁵ Widyawati, A., *Legal Protection Model for Indonesian Migrant Workers*, Journal of Indonesian Legal Studies, Vol. 3, (No.2), 2018, hlm, 291-304

⁶ Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Bandung: CV. Social Politic Genius, 2017, hlm, 56

⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016, hlm, 124

E. PEMBAHASAN DAN KAJIAN HASIL PENELITIAN

1. Bentuk Pertanggungjawaban Yang Mengakibatkan Kerugin Negara Pada BUMN

Peran BUMN tersebut diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi. Seiring dengan berkembangnya dunia usaha dengan tantangannya yang semakin kompleks, pemerintah mendorong agar BUMN dapat terus eksis dengan melakukan ekspansi bisnis agar mendapatkan keuntungan maupun manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Keberadaan BUMN menurut Faisal, “Sudah menjadi gejala umum di dunia, negara-negara dengan sengaja ikut serta dalam usaha perdagangan dengan membentuk perusahaan-perusahaan. Maksud dari keikutsertaan itu tidak lain adalah agar laba atau keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk membiayai jalannya pemerintahan negara dalam rangka menjalankan tugas publiknya.”

Menurut Penulis sebab maju tidaknya perekonomian suatu negara menentukan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Definisi kerugian negara menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang BUMN menentukan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sebagai salah satu pelaku perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa.⁸ Di samping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha

⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: FH UII Press, 2015, hlm, 54

kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi. BUMN dapat melaksanakan kegiatan usahanya didasarkan pada modal layaknya perusahaan pada umumnya. Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yaitu kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya. Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan BUMN tersebut sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang BUMN. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang BUMN yang menentukan bahwa BUMN terdiri dari Persero dan Perum. Kedua jenis BUMN tersebut memiliki maksud dan tujuan yang berbeda namun pada pokoknya merupakan perusahaan negara yang digunakan oleh negara sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Khusus untuk Persero, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 undang-undang a quo berlaku ketentuan dan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.⁹

Kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal negara pada BUMN termasuk dalam salah satu ruang lingkup dari keuangan negara sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Keuangan Negara bahwa, “Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Persero merupakan badan hukum (*rechtspersoon*) yang mandiri dan memiliki hak maupun kewajibannya sendiri termasuk terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki persero tersebut terlepas dari harta kekayaan pendirinya maupun pengurusnya. Konsep pemisahan harta kekayaan pada Persero juga berlaku pula pada negara sebagai badan hukum publik, dengan negara turut serta dalam penyertaan modal di suatu pesero, maka secara serta merta negara dianggap tunduk dalam domain hukum privat. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-

⁹ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, hlm, 31

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan “Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya.” Materi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sesuai dengan konsep dari persero yaitu prinsip entitas terpisah (*separate entity*) dan tanggung jawab terbatas (*Limited liability*). Namun prinsip ini tidak dihiraukan dengan masuknya modal negara dalam perseroan. Oleh sebab itu muncullah kerancuan mengenai kekayaan negara dan kekayaan perseroan dan terkait mengenai pemeriksaan dan kerugian negara. Perbedaan pemahaman keuangan negara juga disebabkan adanya perbedaan definisi dari kerugian negara.

2. Fungsi Penegakan Hukum Pada Perusahaan BUMN belum maksimal

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dirumuskan bahwa keuangan negara meliputi kekayaan negara yang dipisahkan dengan penyertaan modal pada persero, seperti Pasal 2 huruf g yang rumusannya “kekayaan negara / kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.” Apabila membaca Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ini jelas pengertian keuangan negara, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara, sehingga kekayaan negara yang dipisahkan yang dimasukan sebagai penyertaan modal negara di persero adalah tetap kekayaan negara.¹⁰ Sedangkan di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara *a contrario* menentukan hal berbeda menyangkut kekayaan negara yang dipisahkan. Pengertian kekayaan negara tercantum pada Pasal 1 angka (10) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Kekayaan Negara yang dipisahkan berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran

¹⁰ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Grasindo, 2014, hlm, 98

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perusahaan Umum serta perseroan terbatas lainnya. Selanjutnya pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang artinya kekayaan negara yang dipisahkan merupakan kekayaan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terjadi perbedaan arti dari kekayaan negara yang dipisahkan.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merumuskan, "Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD". Dengan adanya pengertian mengenai perbendaharaan negara yang melibatkan investasi dan kekayaan yang dipisahkan dari APBN dan APBD menjadi pertanggungjawaban dan pengelolaan perbendaharaan negara secara otomatis maka menempatkan investasi dalam perseroan dalam domain hukum publik.
- b. Masalah kekayaan negara yang dipisahkan terkait dengan keuangan negara semakin rumit. Terdapat dua pandangan yang sama-sama kuat yaitu yang memandang kekayaan negara yang dipisahkan tetap sebagai bagian keuangan negara, dan yang memandang bahwa dengan adanya kekayaan yang dipisahkan dengan melalui penyertaan modal dalam persero maka, kekayaan yang dipisahkan telah menjadi bagian dari harta kekayaan persero.

2. Saran

- a. Perlu kehati-hatian dalam pelaksanaan pengelolaannya negara, negara tidak dapat sepenuhnya melepaskan pengawasan terhadap pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan tersebut. Namun sebenarnya bahwa dalam pengelolaan keuangan persero maka sepenuhnya merupakan kewenangan dari perseroan sendiri, namun dalam hal ini negara selaku pemegang saham dapat melakukan

proses pengawasan, dan dalam kedudukan sama seperti pemegang saham perorangan lainnya.

- b. Mestinya dinyatakan penegasan atas pertanggungjawaban terbatas yang dimiliki pemegang saham sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”. Dengan demikian maka jelas bahwa harta persero terpisah dengan harta negara. Apabila harta persero sama seperti harta negara maka utang persero sama dengan utang negara yang hal itu bertentangan dengan pertanggung jawaban terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Fuady, Munir, *Doktrin-Doktrin dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Cet. III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014;
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013;
- Khairandy, Ridwan, *Hukum Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: FH UII Press, 2015;
- Raharjo, Handri, *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013;
- Tjandra, W. Riawan, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Grasindo, 2014;
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017;
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016;
- Bambang waluyo, *Penelitian hukum dan praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996;

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia 1945;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembar Negara 3477);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara 4286);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembar Negara 4297);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara 4400);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembar Negara Nomor 4756);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembar Negara 4488);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembar Negara 4609);